

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN KOORDINASI  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DENGAN  
PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT TINDAK  
PIDANA KEHUTANAN TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI  
(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur  
dan Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

DWI AGUSTINA RIMBAWATI  
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Email: dwhy\_aam@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Implementation of the investigation authority Civil Servant (investigators) Forestry on forest crimes against wildlife and coordination that exists between Civil Servant (investigators) Forestry and Indonesian National Police Investigators. This type of research is an empirical law with sociological juridical approach. From the results of this research is that the investigation by investigators Forestry on forest crimes against wildlife are still not optimal, in practice investigators did not arrest the suspect on the grounds suspects are not from a large syndicate suspects cooperative in providing information. Also in the case file completion investigators tend not to seek assistance from the Indonesian Police Investigator in this Korwas (Koordinasi dan Pengawasan) investigators to provide guidance, coordination between the two agencies are not done since the beginning of the alleged crime information, coordination is only done at the time of delivery of the Notice Commencement investigation (SPDP), delivery docket phase I and phase II delivery suspects and evidence. Investigators are expected to improve investigation skills and techniques to maximize the function of coordinating the investigation with police investigators in this case Korwas investigators that the law enforcement process can run synergistic.*

**Key word:** *Investigation, Coordination, Civil Servant (investigators) Forestry, Republic of Indonesia Police Investigators*

**ABSTRAK**

Implementasi kewenangan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terkait tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi dan koordinasi yang terjalin antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan terkait tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi masih belum optimal, dalam pelaksanaannya PPNS tidak melakukan penahanan

terhadap tersangka dengan alasan tersangka bukan berasal dari sindikat yang besar dan tersangka kooperatif dalam memberikan keterangan. Selain itu dalam penyempurnaan berkas perkara PPNS cenderung tidak meminta bantuan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Korwas PPNS guna memberikan petunjuk, koordinasi yang terjalin antara kedua instansi tidak dilakukan sejak awal adanya informasi dugaan tindak pidana, koordinasi hanya dilakukan pada saat pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pengiriman tahap ke 1 berkas perkara dan pengiriman tahap ke II tersangka dan barang bukti. Diharapkan PPNS dapat meningkatkan teknik keterampilan penyidikan dan dapat memaksimalkan fungsi koordinasi dalam penyidikan dengan Penyidik Polri dalam hal ini Korwas PPNS sehingga dalam proses penegakan hukum dapat berjalan sinergis.

**Kata Kunci : Penyidikan, Koordinasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, air, maupun udara. Sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan, serta dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara keserasian dan keseimbangan. Terdapat hubungan timbal balik ataupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, tidak hanya secara individu melainkan juga sebagai kelompok atau komunitas. Potensi keanekaragaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan umat manusia, begitu juga sebaliknya.<sup>1</sup> Salah satu komponen lingkungan hidup yang memegang kunci dalam ekosistem adalah manusia.<sup>2</sup> Kedudukan manusia haruslah bisa memanfaatkan alam sebagai suatu ekosistem yang efektif dan efisien. Salah satu penyebab adanya gangguan terhadap mata rantai ekosistem adalah disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang menjadikan sumber daya alam dan energi menjadi modal utama berlangsungnya proses pembangunan ekonomi. Konservasi dalam makna hakiki memuat konsep perlindungan (*preservation*) serta pengembangan (*development*)

<sup>1</sup> Saifullah, **Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan *criminal* di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati)**, UIN Press, Malang, 2006, hal 12.

<sup>2</sup> Supriadi, **Hukum Lingkungan Indonesia (Sebuah Pengantar)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 3.

sumber daya alam dan energi untuk kebutuhan umat manusia pada masa kini dan mendatang.<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa:

*“Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya”.*

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa :

*“Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”*

Keragaman spesies-spesies hidup harus di lestarikan karena spesies-spesies tersebut merupakan warisan kekayaan alam dari generasi sebelumnya, sehingga harus dijaga untuk generasi mendatang agar tercipta prinsip keadilan antar generasi. Apabila dalam suatu masyarakat mengalami kehilangan atau keterputusan dari ekosistem yang diakibatkan punahnya keragaman hayati, maka tertutuplah akses untuk kehidupan dan kesejahteraan yang layak. Usaha perlindungan hutan termasuk rehabilitasi kawasan hutan dengan habitat berbagai spesies satwa sebagai tujuan memulihkan fungsi ekologi. Pembatasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya hayati pada dasarnya harus dilakukan secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi untuk melindunginya.

Salah satu tindak pidana yang mengancam populasi keanekaragaman hayati adalah tindak pidana Kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi, atau

---

<sup>3</sup> Saifullah, **Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan *criminal* di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati)**, UIN Press, Malang, 2006, hal 26.

yang lebih sering terjadi adalah perdagangan hewan. Perdagangan spesies langka beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan. Sejumlah besar spesies langka secara rutin telah ditangkap dari alam dan diperjualbelikan secara bebas. Terjadi berbagai kasus mengenai tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi khususnya mengenai perdagangan satwa yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, mentalitas dari manusia itu sendiri, dan penegakan hukum yang masih lemah. Propinsi yang paling banyak terjadi perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah Jawa Timur.<sup>4</sup> Proses penegakan hukum harus berjalan efisien dan sinergis antar instansi yang berkaitan. Aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki harus bekerja secara optimal guna pemberantasan tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi. Peran Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.<sup>5</sup> Dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian suatu perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya. Merupakan proses selanjutnya setelah adanya penyelidikan bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana. Penyidikan suatu tindak pidana dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun Fungsi Operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan

---

<sup>4</sup> Admin Profauna, **Siaran Pers: Catatan tahunan 2009 Profauna Indonesia, Perdagangan dan Penyelundupan Satwa Liar Masih Tinggi**, [http. Profauna.net](http://Profauna.net) (diakses pada tanggal 11 Oktober 2012)

<sup>5</sup> Adang, Yesmil Anwar, **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia)**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 283

konflik kepentingan.<sup>6</sup> Koordinasi secara berkala antar instansi mengenai Tindak Pidana Kehutanan secara umum sangat diperlukan guna meningkatkan kerjasama dan pengoptimalan tugas dan wewenang.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi kewenangan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Terkait tindak pidana Kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi ?
2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkait tindak pidana Kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi ?

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan responden yakni Sumarsono, S, H., selaku PPNS Kehutanan yang menangani tindak pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi, Ekaswati S, H., selaku Kasi Korwas PPNS dan Agung Sugiharto selaku Kasubsi BAN Sidik yang berkoordinasi dengan PPNS Kehutanan, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan/literature, studi dokumen, dan akses internet. Teknik analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

## **III. Pembahasan**

### **A. Implementasi Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur**

Penyidikan merupakan awal dari serangkaian proses penegakan hukum pidana guna membuat terang suatu tindak pidana dengan pengumpulan alat bukti, penentuan tersangka dan saksi. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat

---

<sup>6</sup> IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 138.

penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut.<sup>7</sup> Sumber-sumber tindakan pada tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi :

1. Laporan (Dasar hukum pasal 106 KUHAP)

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (pasal 1 butir 24 KUHAP). Pada penanganan perkara oleh PPNS mengenai tindak pidana kehutanan terhadap satwa yang dilindungi laporan dapat diperoleh dari Polisi Kehutanan yang berwenang, laporan tersebut dinamakan laporan kejadian, dan dari masyarakat setempat.<sup>8</sup>

2. Tertangkap tangan (Dasar hukum pasal 111 KUHAP)

PPNS bersama-sama Polhut melakukan patroli secara berkala tergantung situasi dan kondisi yang ada dalam lapangan biasanya dalam setahun dilakukan 3 sampai 4 kali patroli. Tetapi dalam pelaksanaannya Polhut selalu melakukan patroli sesuai dengan kewenangannya dalam ruang lingkup seluruh Jawa Timur.<sup>9</sup> Kekuasaan penyelidikan dalam hal tertangkap tangan ini lebih luas, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, tetapi tetap dalam batas penyelidikan. Berdasarkan pasal 111 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

---

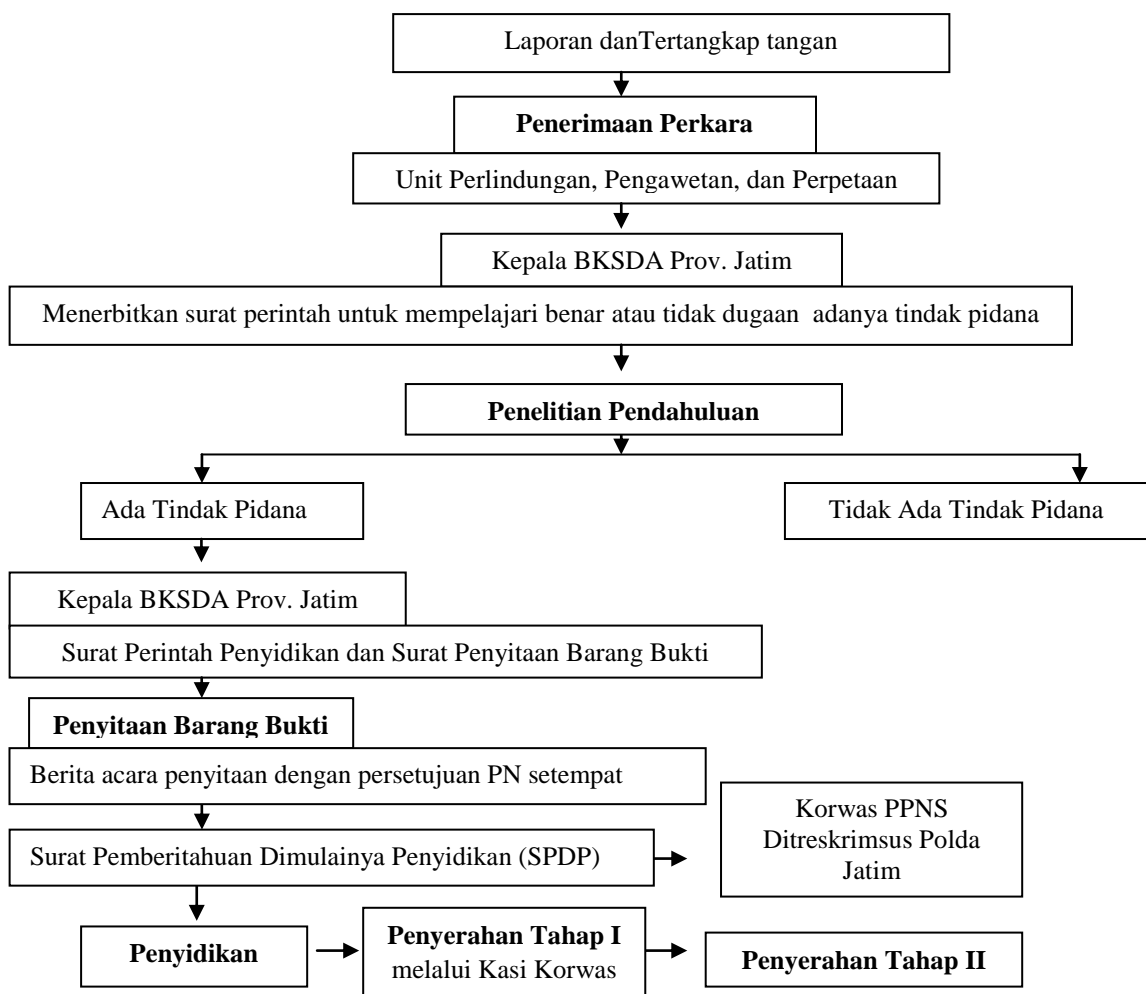
<sup>7</sup> M. Yahya Harahap. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 9Penyidikan dan Penuntutan**). Sinar Grafika. 2005. Hal 113

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sumarsono, PPNS Kehutanan pada tanggal 24 Desember 2012 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sumarsono, PPNS Kehutanan pada tanggal 24 Desember 2012 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang diberi wewenang dan hak khusus sebagai penyidik berdasarkan pasal 39 Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya juncto pasal 7 KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan terhadap satwa yang dilindungi.

Bagan 1  
Proses Penanganan Perkara



Sumber : Data Primer, Diolah, 2013

Proses penanganan perkara dilaksanakan oleh Unit Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Kegiatan penanganan perkara meliputi penerimaan perkara, penelitian pendahuluan, penyitaan barang bukti, penyidikan, penyerahan tahap I dan penyerahan tahap II. Dalam Pelaksanaannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil selalu menjelaskan perkembangan penyidikan dari awal hingga akhir kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, yang dalam hal ini juga selaku PPNS senior. Adanya laporan kejadian dari Polhut untuk selanjutnya melaporkan ke pimpinan selaku kepala Balai Besar Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan surat perintah guna mempelajari benar tidaknya adanya dugaan tindak pidana. Dalam proses pemeriksaan penelitian pendahuluan ini dinamakan PULBAKET, yakni singkatan dari Pengumpulan Bahan dan Keterangan.<sup>10</sup> Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam juga merupakan PPNS senior, jadi dalam pelaksanaannya dapat memberikan pengarahan maupun petunjuk guna kepentingan penyidikan.

Setelah diketahui adanya tindak pidana atau positif (A1) maka Kepala Balai Besar menerbitkan kembali surat perintah penyidikan bersamaan dengan surat penyitaan barang bukti. Barang bukti berupa satwa hidup maupun mati yang harus segera memperoleh perawatan intensif oleh ahlinya. Suatu perbuatan pidana yang oleh penyidik sudah dianggap memiliki bukti yang cukup sehingga dapat dimulai proses penyidikan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut yang nantinya menjadi pegangan penyidik untuk memproses perkaranya. Berdasarkan pasal 109 KUHAP bahwa, tembusan surat tersebut wajib dikirimkan kepada kejaksan selaku lembaga penuntut umum. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke kejaksan melalui Polri. Surat tersebut bersifat pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa ada suatu perkara yang sedang diperiksa di tingkat penyidikan. Dengan adanya tembusan yang dikirim ke kejaksan mempunyai tujuan agar hukum dapat berjalan berkesinambungan mengenai penanganan suatu perkara. Tindak pidana kehutanan terhadap satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sumarsono, PPNS Kehutanan pada tanggal 24 Desember 2012 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam



menyertakan barang bukti berupa satwa yang hidup atau mati, maka untuk segera mungkin diadakan penyitaan terhadap barang bukti tersebut guna memperoleh penanganan sebagaimana mestinya oleh ahli. Penyitaan barang bukti dilakukan dengan membuat berita acara penyitaan oleh PPNS dengan surat terima barang bukti yang sudah lengkap untuk kemudian melaporkan kepada Pengadilan Negeri Setempat guna mendapatkan persetujuan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Barang bukti ditempatkan dalam penguasaan penyidik, yakni dalam lingkungan kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur kira-kira sebulan karena keterbatasan sarana dan prasarana.<sup>11</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yakni Barang bukti dalam perkara pidana kehutanan disimpan atau dikumpulkan di tempat yang tersedia pada instansi kehutanan yang bersangkutan, rumah penyimpanan benda sitaan negara, atau lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar. Satwa harus dipertahankan agar tetap berada dalam atau menyerupai habitat aslinya. Satwa mengadakan proses adaptasi terhadap habitatnya, maka dari itu satwa yang telah disita diserahkan atau dititipkan pada lembaga yang bergerak di bidang Konservasi Tumbuhan dan Satwa sesuai seperti yang diamanatkan pada penjelasan pasal 24 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya. Data lembaga konservasi yang berada di lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Prov Jawa Timur adalah :

- a. Kebun Binatang Surabaya, alamat : Jl. Setail No. 1 Surabaya
- b. Taman Safari Indonesia II Prigen Jawa Timur, alamat : Desa Jatiarjo Kec. Prigen Kab. Pasuruan
- c. Taman Rekreasi Kota Malang, alamat : Jl. Mojopahit Kota Malang
- d. Kebun Binatang Sengkaling, alamat : Jl. Raya Mulyoagung Dau Malang
- e. Jawa Timur Park, alamat : Jl. Kartika No. 2 Batu , Jl. Oro-oro Ombo 9 Batu
- f. Museum Zoologi FR. M. Vianney BHK, alamat : Jl. Karang Widoro 7 Malang
- g. Maharani Zoo dan Goa, alamat : Dusun Panajan RT 02 RW 01 Desa Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan
- h. Taman Wisata Studi Lingkungan, alamat : Jl. Basuki Rahmad Joboan Kel. Magunharjo, Kec. Mayongan Kab. Probolinggo

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sumarsono, PPNS Kehutanan pada tanggal 24 Desember 2012 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

- i. Mirah Fantasia, alamat : Jl. Karimun Jawa No. 81 Manggisari Banyuwangi.<sup>12</sup>

Dalam hal tertangkap tangan pemeriksaan dilakukan kepada saksi, yakni dalam hal ini adalah Polhut serta ahli untuk mengetahui apakah satwa yang merupakan barang bukti adalah jenis satwa dilindungi atau tidak dilindungi. Ahli yang dimaksud adalah salah satu staf yang berada pada Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.<sup>13</sup> Pemeriksaan dinyatakan selesai maka dibuatlah resume uraian secara singkat mengenai pemeriksaan yang dilakukan untuk selanjutnya dilakukan pemberkasan (Berita Perkara) yang dikirim ke kejaksaan melalui Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jatim sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (3) KUHAP. Proses penyerahan berkas tersebut dinamakan penyerahan Tahap I dan jika Berita Perkara sudah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan maka dilakukan penyerahan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Pada saat proses penyidikan berkas perkara yang sudah dirasa lengkap oleh PPNS Kehutanan dikirim ke Kasi Korwas PPNS, Kasi Korwas PPNS memeriksa berkas perkara apakah sudah lengkap atau belum. Apabila belum lengkap maka berkas perkara dikembalikan beserta petunjuk untuk kelengkapan berkas perkara. Berkas Perkara yang sudah diperbaiki dan dirasa lengkap oleh Kasi Korwas PPNS dikirim ke Kejaksaan. Penuntut Umum memeriksa kembali berkas perkara dan jika ternyata hasil penyidikan tersebut belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik dalam hal ini melalui Kasi Korwas PPNS untuk diserahkan ke PPNS Kehutanan. Jika berkas perkara sudah lengkap maka selanjutnya atas pemberitahuan Kasi Korwas PPNS, PPNS Kehutanan melakukan penyerahan tahap ke-II (dua) yaitu penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan terkait tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi, masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS terkait tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi, baik eksternal maupun internal, yaitu :

<sup>12</sup> BbksdaJatim, **Tentang Kami**, <http://bbksdajatim.org> (diakses pada tanggal 13 Desember 2012)

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sumarsono, PPNS Kehutanan pada tanggal 24 Desember 2012 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

a. Kendala Eksternal

1. Tidak adanya pengawasan terhadap kinerja PPNS Kehutanan BBKSDA oleh Kasi Korwas Ditreskrimsus Polda Jatim secara intensif dalam pelaksanaan tugas.<sup>14</sup>
2. Minimnya Jumlah Personil PPNS Kehutanan di BBKSDA , yakni hanya terdapat 1 orang secara structural, sehingga dalam suatu instansi belum menunjuk *leasing officer* yang bertanggung jawab koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jatim.<sup>15</sup>

b. Kendala Internal

1. Berkaitan dengan kurangnya keterampilan dan keahlian PPNS Kehutanan BBKSDA dalam proses pemeriksaan maupun keragu-raguan dalam proses pemeriksaan tersangka dan saksi serta penerapan pasal yang kurang tepat dengan tindak pidana yang disangkakan, sehingga membuat penanganan tindak pidana cenderung lambat;
2. Kurang adanya keberanian PPNS Kehutanan BBKSDA dalam melakukan penyidikan, merupakan akibat dari ketidak adanya koordinasi mulai dari awal adanya dugaan tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda.<sup>16</sup>

**B. Koordinasi Pada Proses Penyidikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur dengan Penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan terhadap Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi, PPNS melaksanakan koordinasi sejak pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Prinsip koordinasi seharusnya dilakukan sejak pertama kali mendapat informasi tentang dugaan adanya tindak pidana. Koordinasi sejak awal dimaksudkan guna pelaksanaan fungsi yang berkelanjutan dari pengawasan. Koordinasi yang dilakukan sejak awal nantinya berlangsung hingga tahap penuntutan. Sesuai dengan kewenangan PPNS yang dimiliki berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang membedakan kewenangannya dengan penyidik Polri hanyalah kewenangan menangkap dan menahan. Maka jika dalam

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sumarsono, PPNS Kehutanan pada tanggal 7 Januari 2013 di Kantor BKSDA Provinsi Jawa Timur

<sup>15</sup> Wawancara dengan Agung Sugiharto, Kasubsi BAN Sidik Korwas PPNS pada tanggal 27 Nopember 2012 di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur

<sup>16</sup> Wawancara dengan Agung Sugiharto, Kasubsi BAN Sidik Korwas PPNS pada tanggal 27 Nopember 2012 di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur

pelaksanaan penyidikan PPNS memerlukan bantuan kepada Penyidik Polri, PPNS harus mengajukan secara tertulis. Pengiriman hasil penyidikan tahap pertama, yakni berkas perkara dan pengiriman tahap ke dua yakni pengiriman tersangka dan barang bukti. Selain tindak pidana kehutanan terhadap satwa yang dilindungi, jika terdapat tindak pidana lain yang dilakukan PPNS Kehutanan sering mengadakan tukar menukar informasi mengenai tindak pidana yang menjadi kewenangan PPNS Kehutanan. Terlepas dari ada atau tidaknya tindak pidana yang sedang ditangani, diadakannya rapat secara berkala kira-kira 3 bulan sekali. Saat dugaan tentang suatu tindak pidana tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Sebelum penyidikan dihentikan demi hukum dilakukan gelar perkara dengan posisi Polri adalah memberi petunjuk dan menghadiri gelar perkara tersebut. Koordinasi dalam pelaksanaan Penyidikan PPNS Kehutanan BBKSDA Prov. Jatim dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jatim :<sup>17</sup>

1. Menerima SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Dilakukan oleh PPNS)
2. Memberi bantuan penyidikan jika ada permintaan dari PPNS yang diajukan secara tertulis
3. Tahap I—Menerima Berkas untuk diteruskan ke Kejaksaan
4. Tahap II – Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti
5. Tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS
  - a. PPNS menemukan dan/atau menerima informasi, laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya peristiwa yang diduga tindak pidana di luar kewenangan PPNS, maka diteruskan ke penyidik;
  - b. Penyidik menemukan dan/atau menerima informasi, laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya peristiwa yang diduga tindak pidana yang juga menjadi wewenang PPNS, maka penyidik dapat melakukan proses penyidikan atau meneruskan kepada PPNS.
6. Rapat secara berkala, rata-rata dilakukan 3 bulan sekali
7. Penyidikan bersama dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk :
  - a. Membentuk tim penyidik;
  - b. Menyusun rencana penyidikan;
    1. Menentukan pasal yang dipersangkakan;
    2. Menentukan cara bertindak;
    3. Menentukan waktu kegiatan;
    4. Menentukan pelibatan personil; dan
    5. Menentukan sarana, prasarana, dan anggaran

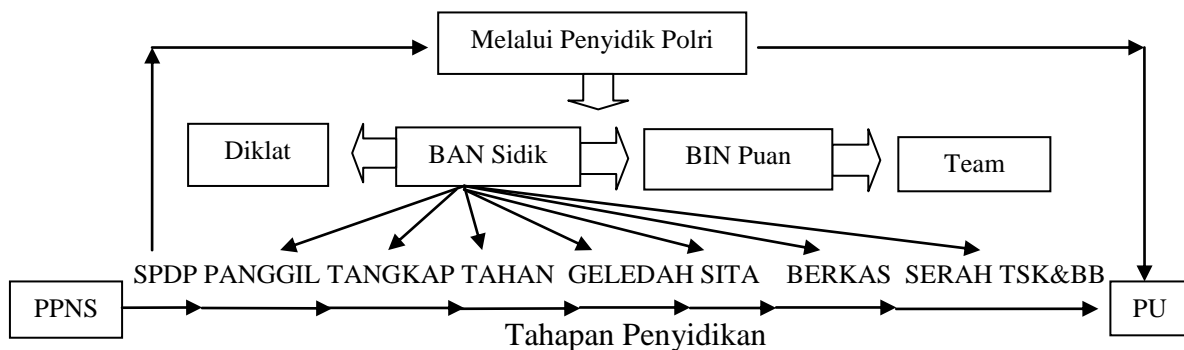
---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Agung Sugiharto, Kasubsi BAN Sidik Korwas PPNS pada tanggal 27 Nopember 2012 di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur

- c. Menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil;
- d. Pengendalian.
- 8. Menghentikan Penyidikan
  - a. Sebelum dilakukannya penghentian penyidikan dilakukan gelar perkara bersama penyidik;
  - b. Dalam hal hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan;
  - c. PPNS mengirimkan surat penghentian penyidikan kepada :
    - 1. Penuntut umum melalui penyidik dan
    - 2. Tersangka atau keluarga dan/atau penasehat hukumnya.
- 9. Gelar Perkara, dilakukan terhadap setiap perkara yang ditangani yang dapat dihadiri penyidik atau pihak terkait. Gelar perkara dilaksanakan pada:
  - a. Awal penyidikan, dilakukan untuk :
    - 1. Menentukan peristiwa yang akan ditangani merupakan tindak pidana atau bukan;
    - 2. Menentukan pasal yang disangkakan;
    - 3. Menyusun rencana penyidikan
  - b. Pertengahan penyidikan dilakukan untuk :
    - 1. Menyempurnakan ketepatan penerapan pasal;
    - 2. Mengetahui perkembangan penyidikan;
    - 3. Mengetahui dan mengatasi kendala atau kekurangan penyidikan;
    - 4. Melengkapi alat bukti;
    - 5. Menyempurnakan proses penyidikan.
  - c. Akhir penyidikan dilakukan untuk :
    - 1. Menganalisis secara yuridis terhadap keterkaitan saksi, tersangka, dan barang bukti untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan;
    - 2. Menganalisis perbuatan pelaku untuk menentukan peran;
    - 3. Mengetahui kelengkapan administrasi penyidikan;
    - 4. Mengetahui kelengkapan berkas perkara.

Bagan 2

Proses Koordinasi dan Pengawasan pada Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Korwas PPNS



Sumber : Data Sekunder, di olah 2013

Berdasarkan Bagan 2 dapat dijelaskan bahwa proses koordinasi dan pengawasan pada penyidikan yang dilakukan oleh Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jatim adalah dimulai dari dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh PPNS Kehutanan. Apabila dalam suatu perkara tersebut diperlukan suatu upaya Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan maka PPNS Kehutanan berkoordinasi dengan Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jatim. Berkas perkara yang dibuat oleh PPNS dikirim kepada Kasi Korwas PPNS untuk selanjutnya dilihat apakah sudah benar atau masih ada yang kurang. Jika berkas tersebut masih kurang lengkap maka Kasi Korwas PPNS mengembalikan berkas tersebut dengan memberitahukan letak kekurangannya, sebaliknya jika berkas perkara sudah dirasa lengkap maka melalui Kasi Korwas PPNS berkas dikirim ke Penuntut Umum. Penuntut umum melihat apakah berkas sudah lengkap apabila lengkap maka tidak perlu dikembalikan lagi melalui Kasi Korwas PPNS kepada PPNS Kehutanan. Penyerahan berkas perkara merupakan penyerahan tahap ke-I (satu) untuk selanjutnya dilakukan penyerahan tahap ke-II (dua), yakni penyerahan barang bukti dan tersangka.

Pembinaan Kasi Korwas PPNS yang dilakukan oleh Pembinaan Kemampuan (BIN Puan) kepada PPNS Kehutanan adalah dengan diadakannya diklat rutin yang dilakukan yakni setahun sekali, diklat tersebut diikuti oleh seluruh PPNS di Wilayah Jawa Timur. Diklat yang dilakukan mempunyai tujuan yakni agar kinerja dari seluruh PPNS dapat maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Kasi Korwas PPNS pada saat proses Penyidikan, sekiranya diperlukan bantuan taktis maupun bantuan teknis yang dilakukan oleh Bantuan Penyidikan (BAN Sidik) untuk selanjutnya mengirimkan team guna menindak lanjuti permintaan PPNS Kehutanan.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi, barang bukti berupa satwa dalam keadaan hidup atau mati yang pada dasarnya sumber tindakan berasal dari laporan maupun yang tertangkap tangan untuk penyitaan langsung dilakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut). Penyitaan barang bukti haruslah dilakukan Polda Jatim berdasarkan permintaan yang secara tertulis dari PPNS Kehutanan. Permintaan penyitaan dilakukan secara

tertulis yang memuat uraian singkat perkara, sasaran penyitaan, dan pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan dengan dilampiri laporan kejadian, dan laporan kemajuan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berdasarkan pasal 39 ayat (3) huruf D Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan maupun penyitaan. Satwa sebagai barang bukti merupakan hewan yang perlu penanganan khusus oleh ahlinya, ahli disini adalah pihak dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur. Satwa dalam keadaan hidup atau mati memerlukan penanganan khusus, jika satwa tersebut dalam keadaan hidup maka diperlukan perawatan dalam penyimpanannya, dalam penyimpanan barang bukti berupa satwa yang hidup tidaklah mudah karena tempat penyimpanan satwa tersebut haruslah layak dan sesuai dengan karakteristik satwa berdasarkan habitat. Sedangkan satwa dengan keadaan mati juga dilakukan upaya perawatan kelanjutan seperti misalnya dikubur.<sup>18</sup>

Alasan dilakukannya Penangkapan berdasarkan pasal 17 KUHAP adalah seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan yang kuat tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Sedangkan alasan dilakukannya Penahanan adalah terdapat alasan subjektif dan alasan objektif. Sekiranya dalam tindak pidana kehutanan terhadap satwa yang dilindungi sudah memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya penahanan tapi oleh PPNS kehutanan statusnya masih dijadikan saksi dan tidak dilakukan penahanan dengan alasan bahwa tersangka bukan berasal dari suatu sindikat yang besar dan dalam memberikan keterangan tersangka bersifat kooperatif.<sup>19</sup> Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jika sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya penahanan, maka harus segera dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan yang sudah masuk kedalam persyaratan. KUHAP menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing aparat penegak hukum, tetapi KUHAP juga memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sumarsono, PPNS Kehutanan pada tanggal 24 Desember 2012 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sumarsono, PPNS Kehutanan pada tanggal 14 Desember 2012 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur

menjernihkan tugas dan wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam “sistem ceking” antar sesama mereka.<sup>20</sup> Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan mulai dari awal mendapat informasi tentang adanya dugaan mengenai tindak pidana tidak pernah berkoordinasi dengan Korwas PPNS.<sup>21</sup> PPNS hanya melakukan suatu koordinasi saat pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Pengiriman tahap I, dan Pengiriman tahap II. Koordinasi seharusnya dilakukan sejak pertama kali, yakni sejak mendapat informasi, karena jika sistem ceking akan diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan KUHAP maka pengawasan dan hubungan koordinasi akan bersifat fungsional dan instansional. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan koordinasi Korwas PPNS agar penegakan hukum antar instansi dapat berjalan efektif. Masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya menciptakan hubungan yang saling bersinergis demi penyelesaian proses penegakan hukum. Sinkronisasi proses penegakan hukum sangat diperlukan antar penegak hukum yang bersangkutan dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan Korwas PPNS agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan sinergis serta tidak membuang banyak waktu.

Tidak adanya koordinasi mulai awal informasi dugaan adanya tindak pidana menyebabkan proses penyidikan ditangani sendiri oleh PPNS Kehutanan. Pengiriman tahap I (satu) yakni pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan sebelumnya melewati Kasi Korwas PPNS akan dilihat dahulu apakah sudah lengkap atau masih ada kekurangan, jika masih ada kekurangan maka kasi korwas PPNS memberitahu letak kekurangan untuk selanjutnya diperbaiki. Korwas PPNS akan meneliti terlebih dahulu terutama yang menyangkut administrasi penyidikan, resume, penerapan pasal serta analisis yuridisnya.<sup>22</sup> Konsekuensi bolak baliknya

---

<sup>20</sup> M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 49

<sup>21</sup> Wawancara dengan Sumarsono, PPNS Kehutanan pada tanggal 14 Desember 2012 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ekaswati, Kasi Korwas PPNS pada tanggal 27 Nopember 2012 di Ditreskrimsus Polda Jatim



berkas perkara antara PPNS Kehutanan dan Kasi Korwas PPNS membutuhkan waktu yang relative lebih lama karena tidak adanya koordinasi dari awal. Pengiriman berkas perkaranya selanjutnya oleh Korwas PPNS dikirim ke Kejaksaan, hal tersebut juga membutuhkan waktu lagi untuk menyatakan berkas tersebut lengkap (P.21). Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia harus berdasar pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009. Adanya keterbatasan kemampuan dalam faktor internal PPNS tanpa berkoordinasi dengan Polri akan menyebabkan asas tersebut tidak terpenuhi karena proses penyidikan akan menjadi lambat. Pada dasarnya koordinasi dilakukan agar peraturan dengan tindakan tidak saling bertentangan. Jadi sejauh tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan, koordinasi yang terjalin akan efektif apabila sendi-sendi dalam hubungan fungsional tetap terjalin. Objek yakni berupa Satwa liar yang dilindungi, Kategori untuk dilindungi ataupun tidak diserahkan sepenuhnya kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagai ahli dari keanekaragaman hayati. Satwa liar yang dilindungi disimpan dalam kekuasaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebelum adanya penyerahan tahap ke-II (dua). Maka benar apabila Tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi merupakan tindak pidana khusus yang penanganannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam kewenangannya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam hal proses penanganan perkara harus dibekali pengetahuan tentang penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya guna penegakan hukum yang optimal. PPNS Kehutanan juga seorang penyidik yang tau akan karakteristik satwa berdasarkan klasifikasi dilindungi atau bukan, sehingga apabila satwa liar yang menjadi barang bukti, PPNS berdasarkan kewenangannya harus mempertahankan satwa tersebut agar tetap berada dalam habitatnya. Maka satwa liar yang telah dirampas akan dikembalikan ke habitatnya. Jika tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya, dan/atau satwa tersebut akan dijadikan barang bukti di pengadilan, maka satwa tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak pada bidang konservasi. Jika PPNS sudah mempunyai kemampuan yang cukup pada proses penyidikan untuk

mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka dengan memanfaatkan fungsi koordinasi secara maksimal dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia maka akan tercipta asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada proses penegakan hukum di Indonesia.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan :**

1. Implementasi kewenangan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terkait tindak pidana Kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, dalam pelaksanaannya PPNS tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan tersangka bukan berasal dari sindikat yang besar dan tersangka kooperatif dalam memberikan keterangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan juga dalam proses penyidikannya tidak meminta bantuan penyidikan dalam hal memberikan petunjuk, sehingga dalam hasil penyidikan merupakan murni hasil analisis dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.
2. Koordinasi yang dilakukan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkait tindak pidana kehutanan terhadap satwa yang dilindungi belum berjalan optimal sebab dalam mekanisme koordinasi yang terjalin antara PPNS dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kasi Korwas PPNS wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS baik diminta atau tidak diminta. PPNS dalam menagani tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi tidak meminta bantuan penyidikan terhadap Kasi Korwas PPNS dalam hal memberi petunjuk, tetapi bukan berarti Kasi Korwas hanya menunggu permintaan bantuan tetapi juga harus berperan aktif dalam proses penyidikan yang dilakukan PPNS guna penegakan hukum yang berjalan dengan sinergis. Koordinasi juga tidak dilakukan sejak awal adanya informasi mengenai tindak pidana tersebut. Koordinasi yang dilakukan PPNS Kehutanan adalah terkait pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penyerahan tahap I , dan penyerahan tahap

II. Pada penyerahan tahap ke I berkas langsung dikirim ke Korwas PPNS, yang nantinya Korwas PPNS akan mengirim berkas tersebut ke Kejaksaan.

### **B. Saran :**

#### **1. Bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur**

PPNS dalam melakukan penyidikan hendaknya tidak ragu untuk mengambil sikap/tindakan terhadap tersangka serta tidak ragu untuk meminta bantuan serta petunjuk kepada Korwas PPNS, sehingga koordinasi akan terjalin mulai awal adanya informasi tindak pidana, Koordinasi yang berjalan sinergis akan membuat proses penegakan hukum berjalan optimal.

#### **2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia**

Pengembangan fungsi koordinasi dan pengawasan (Korwas) PPNS pada khususnya agar selalu menjalin koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PPNS. Khususnya PPNS Kehutanan, sehingga dalam proses penanganan perkara yang dilakukan PPNS Kehutanan, hendaknya Korwas PPNS tidak menunggu adanya permintaan bantuan melainkan bersedia mengawasi langsung terhadap perkara yang dtangani oleh PPNS, sehingga akan muncul inisiatif untuk saling bekerjasama.

#### **3. Bagi Pemerintah**

DPR selaku lembaga legislative hendaknya segera mengesahkan RUU konservasi keanekaragaman hayati (kehati), karena didalam Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih belum dapat mengakomodir kewenangan PPNS secara keseluruhan dalam rangka penyidikan.

#### **4. Bagi Masyarakat**

Seyogyanya masyarakat lebih kooperatif dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi disekitarnya, terutama mengenai tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi, sehingga dapat berperan aktif dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

Adang & Anwar Yesmil, 2009, **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia)**, Bandung: Widya Padjadjaran.

Alam Setia Zain, 1996, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah, 2000, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika.

Masruchin Rubai, 2001, **Asas-asas Hukum Pidana**, Malang: UM Press.

M. Faal, 2002, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**, Jakarta: Pradnya Paramita.

M. Yahya Harahap, 2000, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua**, Jakarta: Sinar Grafika.

Saifullah, 2006, **Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati)**, Malang: UIN Press.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, Bnadung: Eresco.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

**Internet**

BbksdaJatim, Tentang Kami, <http://bbksdajatim.org>

Admin Profauna, Siaran Pers: Catatan tahunan 2009 Profauna Indonesia perdagangan dan penyelundupan satwa liar di Indonesia masih tinggi, <http://Profauna.net>

Wibowo, Budi H, 2009, Koordinasi dan Manajemen (online), <http://Warungwacana.com/2009/06/koordinasi-dan-manajemen-html>.

Wahyudi, Pendekatan Yuridis Sosiologis, <http://www.unsoed.ac.id>.